

ABSTRAK

- (A) Judul : Politik Hukum Perlindungan Pemegang Hak atas Tanah berdasarkan Asas *Rechtsverwerking*. (Kajian atas Putusan Pengadilan terhadap Sengketa Hak atas Tanah)
- (C) Nama Mahasiswa : Naomi Elvienne Yanto (NIM: 207172009)
- (D) Kata Kunci : Politik Hukum, Asas, *Rechtsverwerking*, Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah.
- (E) Isi Abstrak :
UUPA berhasil merombak politik hukum pertanahan bekas jajahan pemerintah hindia belanda yang individualistik, dan mengadakan unifikasi hukum tanah. Akibat diadakannya unifikasi hukum tanah di Indonesia, yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, maka diamanatkan pada Pasal 19 UUPA untuk mengadakan Pendaftaran Tanah, yang kemudian menghasilkan tanda bukti hak yang kuat. Akan tetapi, ironisnya sudah 59 tahun sejak diundangkan UUPA, masih ada sengketa kepemilikan hak yang kemudian membatalkan Sertifikat Hak atas Tanah yang harusnya memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Padahal, pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur secara jelas bahwa Hukum Tanah Indonesia, bersumber pada hukum adat. Oleh karenanya, dikenal asas *Rechtsverwerking*. Politik Hukum sebagaimana dikonsepskan sebagai pernyataan kehendak penguasa mengenai hukum yang berlaku dan arah perkembangan hukum yang akan diberlakukan. Penelitian ini merupakan studi politik hukum yang memspesifikasikan penelitian pada penegakan hukum pada kenyataannya di lapangan, dan melakukan kajian terhadap putusan-putusan pengadilan sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang melakukan kajian terhadap asas-asas hukum. Karena penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian yang bersifat filosofis, maka peneliti melakukan kajian secara radikal, sekaligus memberikan refleksi kritis. Sehingga untuk mendukung argumentasi peneliti pada hasil analisa dengan pendekatan kualitatif, maka hasil analisa penelitian disajikan dengan bentuk narasi, point-point, tabel, dan indikator.